
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS INDONESIA

Volume 5, Nomor 1, Oktober 2017

FMI

FORUM MANAJEMEN
INDONESIA

DAFTAR ISI

- 1-11** MINAT, PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA BARU DALAM MEMILIH FEB UNJA
Shofia Amin
- 12-21** BRAND VALUE, ASSET TANGIBILITY, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE KEUANGAN
I Made Sudana, Gusti Ayu Putu Wyndi Werdhianti
- 22-33** KEPUASAN KERJA DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DAN KINERJA PERAWAT PADA RUMAH SAKIT SOGATEN MADIUN
April Liya Prastiyani, Veronika Agustini Srimulyani
- 34-47** PERAN PERILAKU KERJA BERBASIS PRAKTEK MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ISLAMI MENUJU PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI
Sandy Mulya Adhi, Olivia Fachrunnisa
- 48-61** PENGARUH KOMPETENSI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO
Rahmisyari
- 62-77** ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI, DAN SISTEM KONTROL TERHADAP KINERJA ORGANISASI MELALUI PERILAKU PELAYANAN
Dyah Sawitri, Wiliarisa Prita Purwanti, Kohar Adi Setia
- 78-91** PENGARUH JOB SATISFACTION, JOB PERFORMANCE DAN WORKPLACE ENVIRONMENT TERHADAP EMPLOYEE TURNOVER INTENTION PADA PT. ABC
Setia Tjahyanti, Ranti Noviannisa Purnomo
- 92-102** MODEL PENENTU MARKET PRICE OF SHARE PADA SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI
Tita Deitiana, Renata Chriselda
- 103-116** ANALISIS PERAN PEMERINTAH TERHADAP KEBERHASILAN UMKM KOTA SURABAYA
Sri Nathasya Br Sitepu
- 117-132** PENGARUH KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN SERTA DAMPAKNYA PADA LOYALITAS PELANGGAN (STUDI EMPIRIS PADA KORAN HARIAN SUARA MERDEKA DI KOTA SEMARANG)
Suzy Widayari, Euis Soliha, Sophiyanto Wuryan, Lenny Dwi Damayanti

Analisis Peran Pemerintah Terhadap Keberhasilan UMKM Kota Surabaya

Sri Nathasya Br Sitepu
Universitas Ciputra Surabaya
Nathasya.sitepu@ciputra.ac.id

Abstrak

Peran pemerintah dalam perekonomian dapat dilihat melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap keberhasilan UMKM di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis SEM-PLS. UMKM kota Surabaya merupakan objek penelitian yang menggunakan 100 sampel UMKM. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh kebijakan moneter secara terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya nilainya lebih kecil dibandingkan pengaruh kebijakan moneter yang menggunakan kebijakan fiskal memediasi kesuksesan UMKM Kota Surabaya.

Kata Kunci: Kesuksesan UMKM, SEM-PLS, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter,

1. Pendahuluan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 sebesar 5,06 % dengan nilai total PDB tahun 2015 sebesar Rp.2.909.181,5. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 sebesar 5,18% berdasarkan data BPS. Pendapatan Domestik Bruto yang bersal dari Sembilan sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh sembilan sektor/lapangan usaha diantaranya: 1) Pertanian, peternakan kehutanan dan perikanan, 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4) listrik, gas, dan air bersih, 5) bangunan, 6) perdagangan, hotel dan restoran, 7) pengangkutan dan komunikasi, 8) keuangan, persewaan & jasa perusahaan. dan 9) jasa-jasa. Sumbangan pendapatan yang besar diperoleh dari sektor perdagangan, hotel dan restoran khususnya dari sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan total nilai Rp. 437.784,4 (Miliar rupiah). Besarnya sumbangan sektor perdagangan pada PDB menjadi alasan pemerintah untuk memaksimalkan potensi sektor perdagangan melalui regulasi dalam bentuk kebijakan moneter dan kebijakan publik. Sektor perdagangan eceran ini mengacu pada usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di Indonesia. UMKM merupakan unit usaha yang *relative* kokoh dalam menghadapi gejolak perekonomian(krisis ekonomi) hal ini dikarenakan modal yang dibutuhkan *relative* lebih sedikit. Sebaran UMKM di Jawa timur sebesar 6.825.931 unit UMKM yang bergerak diberbagai sektor industri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) merupakan salah satu bentuk unit bisnis di Indonesia. Menurut UU No: 20 Tahun 2008 defenisi masing-masing dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini “.

Klasifikasi UMKM dapat ditinjau dari aspek keuangan yang menjelaskan karakteristik dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ekonomi mikro membahas aspek: kebutuhan pelanggan, permintaan dan penawaran, pasar dan persaingan pada pasar tenaga kerja (Schiler, 2009: 36). Usaha Mikro adalah sebagai memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Karakteristik Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih maksimal Rp500.000.000,00 dimana, hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 dan maksimal Rp2.500.000.000,00. Kriteria usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 dengan nilai penjualan maksimal Rp10.000.000.000,00. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai maksimal Rp50.000.000.000,00. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) berdasarkan UU No:20 Tahun 2008 bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Tujuan UMKM sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat oleh karena itu UMKM merupakan sektor ekonomi yang menjadi perhatian untuk dikembangkan. Penelitian Wong and Tjosvold, (2015) menjelaskan bahwa pemerintah yang kompeten dan perhatian akan mengatur secara efektif sehingga, mendapat kepercayaan sosial yang berimbang pada kepercayaan bisnis. Kebijakan pemerintah terkonfirmasi melalui kondisi sosial masyarakat sebagai tolak ukur pengembangan bisnis/usaha. Kebijakan moneter dan fiskal mendukung keberlangsungan UMKM wilayah Kota Surabaya. Kebijakan moneter merupakan pengaturan jumlah uang beredar oleh pembuat kebijakan di bank sentral (Menkew *et. al* 2013: 144) sementara Welch and Gerry (2007: 244) menjelaskan kebijakan moneter merupakan kondisi perubahan jumlah uang beredar yang mempengaruhi tingkat output, kesempatan kerja dan harga dalam perekonomian. Schiller (2009: 295) menjelaskan kebijakan moneter adalah kegiatan mengubah hasil makro dengan mengelola jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Kebijakan moneter memiliki tiga alat kebijakan yang penting diantaranya: a) Operasi pasar terbuka (*Open market operations*), b) Syarat cadangan minimum (*reserve requirement*), c) Tingkat diskonto (*Discount rate*). Sambajee, dan Dhomon (2015) menemukan dampak peran pemerintah disektor keuangan berupa kegagalan pemerintah Mauritius untuk memfasilitasi akses sektor keuangan dan menyediakan layanan dukungan bisnis telah memimpin UKM Maladewa untuk menggunakan untuk mempertahankan bisnis yang ada dan/atau mulai yang baru. Kebijakan Moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2015 adalah KUR (kredit Usaha Rakyat). KUR dengan tingkat suku bunga 12% *flat* dalam setahun diharapkan pemerintah dapat membantu keuangan bagi para UMKM. Modal dengan suku bunga yang relative rendah dapat dikelola untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat diperjual-belian.

Welch and Gerry (2007:185) menjelaskan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi kegiatan tingkat *output agregat* atau harga melalui perubahan belanja pemerintah, pembayaran transfer dan pajak. Fraser *et.al* (2011: 459) menjelaskan defenisi kebijakan fiskal melibatkan pengeluaran pemerintah dan pendapatan untuk mengejar tujuan kebijakan makro ekonomi. Fraser *et.al* (2011: 460) menjabarkan sumber pendapatan berasal dari lima komponen:

- a. Pajak penghasilan penduduk (PPH)
- b. Pajak keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan sumber daya alam.
- c. Pajak dari industri kendaraan bermotor.
- d. Pajak penjualan
- e. Pajak pada deposito atau transaksi keuangan.

Pemerintah tidak hanya memiliki sumber pendapatan namun, pemerintah juga akan membelanjakan pendapatan negara untuk membiayai:

- a. Biaya gaji pegawai negeri
- b. Pembangunan infrastruktur, transportasi dan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan.

Kebijakan fiskal ditempuh melalui tiga langkah kerja diantaranya: kebijakan yang berhubungan dengan konsumsi pemerintah, besarnya tingkat pajak yang dibebankan pemerintah, tarif subsidi yang diberikan kepada produk tertentu dan besarnya dana pinjaman yang diperoleh dari luar negeri. Regulasi pemerintah juga dapat berbentuk pembatasan kuota impor sehingga produk dan jasa yang dihasilkan UMKM mampu bersaing di pasar dalam negeri. Regulasi pemerintah yang lain berupa kebijakan alokasi belanja negara untuk memberikan pelatihan ataupun bantuan berupa alat dan mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi dari UMKM. Hasil penelitian Cebula, and Clark (2016) mengatakan negara-negara OECD, melalui kebijakan pemerintah mulai mempromosikan semangat kewirausahaan dan kualitas kerja yang lebih tinggi. Peraturan pemerintah yang berkualitas membuat pertumbuhan bisnis lebih tinggi dibandingkan peningkatan kebebasan ekonomi dan pertumbuhan standar hidup masyarakat. Krichevskiy and Snyder, (2015) dalam penelitiannya menegaskan peran pemerintah dengan meningkatkan pajak berhubungan dengan penurunan netto dalam bisnis. Akinboade dan Kinpack, (2012) menjelaskan regulasi/kebijakan yang kaku, tidak konsisten dan korupsi berdampak negatif pada bisnis. Ketaatan terhadap peraturan kesehatan, keselamatan dan aturan perdagangan memberikan pengaruh yang baik untuk pengembangan UMKM. Caldas and Cesar (2013) mengatakan keadaan perekonomian Brasil berada pada kondisi kebijakan moneter dan fiskal serta kredibilitas rezim moneter mempengaruhi aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap harapan pengusaha semakin tinggi. Regulasi/kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dapat mendukung keberlangsungan UMKM sehingga sumbangan sub sektor perdagangan besar dan eceran pada PDB nasional meningkat. Ojo, M. (2011) memaparkan pemerintah memiliki peran penting untuk mengawasi dan tanggung jawab atas perusahaan atau lembaga keuangan (bank-bank) yang eksklusif dan sulit dipantau hal ini berkaitan dengan adanya kemungkinan pihak swasta akan mengurangi insentif yang dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini penting dikarenakan kebijakan makro ekonomi (kebijakan fiskal dan kebijakan moneter) yang tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat segera dikaji ulang. Berdasarkan penjelasan kondisi UMKM Kota Surabaya diatas maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana kondisi UMKM di Kota Surabaya ?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya ?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya ?
4. Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya melalui kebijakan fiskal sebagai variabel mediasi ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada UMKM Kota Surabaya. Populasi UMKM di kota Surabaya berdasarkan data sebanyak 260.762 unit UMKM. Penelitian memilih responden berdasarkan metode *purposive sampling* dimana, teknik *purposive* berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2007:392).

Pertimbangan yang digunakan untuk memilih sampel yang diteliti adalah UMKM yang memiliki beberapa kualifikasi yaitu:

1. UMKM beroperasi di Kota Surabaya.
2. UMKM yang menjalankan bisnis minimal satu tahun.
3. UMKM yang sudah memiliki *out comes* berupa barang/jasa yang sudah dipasarkan.
4. UMKM yang sudah melakukan transaksi jual-beli sehingga menghasilkan laba/profit.
5. UMKM yang sudah memiliki siklus produksi, pendapatan dan pengeluaran.

Besarnya jumlah populasi menuntukan peneliti untu mengambil sampel berdasarkan 5 pertimbangan diatas. Rumus perhitungan sampel menurut Bungin 2012:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N= Jumlah populasi

d = Nilai presisi

$$n = \frac{260.762}{260.762 (0.1)^2 + 1} = 99,96$$

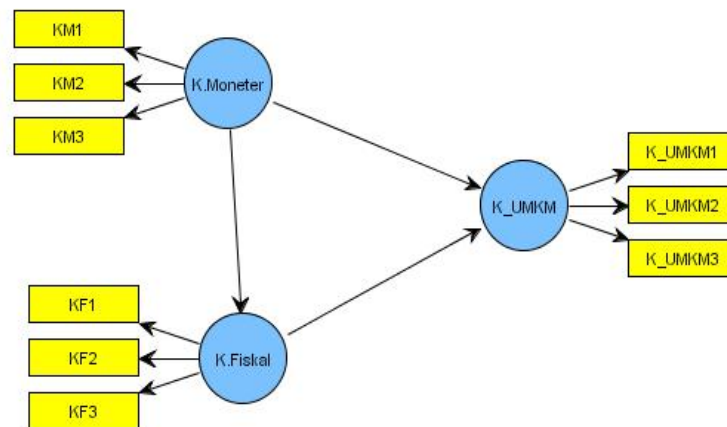
Berdasarkan hasil perhitungan maka total sampel sebesar 99,96 responden yang akan dibulatkan menjadi 100 orang responden untuk memberikan data. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Sampel yang telah dipilih selanjutnya akan ditafsirkan dan dilakukan penarikan kesimpulan penelitian menggunakan model deduksi artinya: hasil perhitungan sampel diatas sebesar 100 responden yang akan memberikan data. Setiap sampel akan memberikan data yang diukur menggunakan skala likert sebagai alat pengukuran data. Skala *likert* digunakan untuk pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi orang terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2015:168).

Tabel 1. Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber: Sugiyono, 2015:168

Penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM merupakan jenis analisis multivariate dalam ilmu sosial. Analisis multivariat merupakan aplikasi statistik untuk menganalisis beberapa variabel penelitian secara bersamaan Sholihin dan Ratmono (2013: 2). Penelitian ini menggunakan analisis SEM-PLS yang merupakan pendekatan dengan model kausal yang memiliki tujuan memaksimalkan variansi dari variabel laten kriteria yang dapat dijelaskan oleh variabel laten *predictor* (Sholihin dan Ratmono, 2013:7).



Gambar 1 Kerangka Analisis
Sumber : Data yang dikelola

2.1. Hipotesis

Hipotesis menurut Bungin (2013:90) adalah suatu kesimpulan yang belum sempurna yaitu:

- H1 = Kebijakan Moneter (X1) berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM (Y)
 H2 = Kebijakan Fiskal (X2) berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM (Y)
 H3 = Kebijakan Fiskal (X2) memediasi pengaruh Kebijakan Moneter (X1) terhadap Kesuksesan UMKM (Y)

2.2. Uji Statistik Deskriptif

2.2.1. Merancang *Inner Model*

Perancangan *inner model* untuk menganalisis hubungan antara variabel laten, terdapat dua variabel dalam *inner model* yaitu variabel laten dependen dan variabel laten independen. *Inner model* dirancang berdasarkan hubungan antar variabel yang terdapat pada rumusan masalah dan hipotesa penelitian. Model struktural adalah model yang menghubungkan antar variabel laten. Pengukuran model struktural terdiri dari:

1. Estimasi untuk koefisien jalur: signifikansi masing-masing koefisien jalur dinilai dengan prosedur bootstrap (Hair *et al*, 2011).
2. Uji *f Square (effect size)* : Nilai *f square* pada penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sedangkan variabel eksogen dalam penelitian ini adalah kesuksesan UMKM Kota Surabaya. Kriteria penilaian *f square* adalah sebagai berikut : $0,02 \leq f \leq 0,15$ = efek kecil, $0,15 \leq f \leq 0,35$ = efek medium, $f \geq 0,35$ = efek besar.
3. Uji signifikansi dan besarnya pengaruh variabel laten, Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Pada tahap ini dilakukan uji hipotesis *path coefficient*. Nilai yang disarankan adalah $>1,96$ (Hair *et al*, 2011). Dengan melihat koefisien analisis jalur (*path coefficient*) maka dapat dilakukan evaluasi besarnya pengaruh masing-masing variabel laten independen (Widarjono, 2015:277).

4. Uji hipotesis : Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) menggunakan *software Partial Least Square* (PLS). SEM merupakan salah satu jenis analisis multivariat yang merupakan aplikasi metode statistika untuk analisis beberapa variabel penelitian secara serempak (Sholihin dan Ratmono, 2013:2).
5. Nilai R^2 (*R-square*), semakin besar R^2 maka semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen (Hair *et al*, 2011).

2.2.2. Merancang *Outer Model*

Perancangan *outer model* untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten dan variabel indikator. Indikator dievaluasi dengan menguji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2015:203). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.

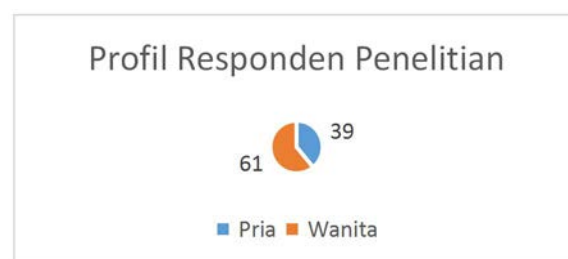
- Uji Validitas Konvergen : seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut. Validitas konvergen dapat dilihat dari nilai *outer loading*, nilai *outer loading* 0,5-0,7 menunjukkan cukup valid yang diartikan bahwa variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator rata-ratanya (Widarjono, 2015:277).
- Uji Validitas Diskriminan : validitas diskriminan diukur dari nilai *cross loading* variabel indikator terhadap variabel laten harus lebih besar nilainya terhadap variabel laten yang lain.

b. Uji Reliabilitas

Bungin (2013:279), untuk mencapai tingkat reabilitas dapat dicapai jika alat ukur dipakai berulang kali tetap akan menghasilkan hasil ukur yang sama, ketepatan konsep penelitian, dan homogenitas dimana alat ukur memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *cronbach's alpha* yang mencerminkan reliabilitas semua indikator dan menggunakan *compositive reliability*. Syarat nilai *cronbach's alpha* yaitu $> 0,6$ sedangkan untuk *compositive reliability* $> 0,6$ untuk dapat memenuhi kriteria reliabel.

3. Hasil dan Pembahasan

Profil UMKM merupakan usaha kecil-menengah yang dimiliki oleh masyarakat luas. Berdasarkan hasil *survey* profil responden digambarkan pada gambar diagram dibawah.



Gambar 2. Profil Responden Penelitian
Sumber: Data Diolah

Pelaku bisnis UMKM mayoritas adalah ibu-ibu dimana usaha yang mereka jalankan merupakan usaha tambahan untuk menopang perekonomian keluarga. Sementara suami(pria) yang merupakan kepala rumah tangga memiliki pekerjaan tetap untuk menopang perekonomian keluarga. Usia dari pelaku UMKM berada di kisaran 35 tahun – 55 Tahun. Usia ini merupakan usia produktif untuk melakukan aktivitas. Bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM memiliki modal yang *relative* kecil dengan membuka kios dan menjalankan usaha dengan target pasar pada masyarakat menengah. Mayoritas bisnis yang dijalnkan adalah pedagang asongan atau kios yang berada di seluruh wilayah Kota Surabaya. Kios/unit bisnis yang dikembangkan memiliki kapasitas *output* yang terbatas dengan penggunaan teknologi *relative* sederhana.

3.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

3.1.1. Variabel Kebijakan Moneter (X1)

Variabel kebijakan moneter diukur dengan empat indikator yang tercermin dalam kuisioner.

Tabel 2. Deskriptive indikator dari variabel kebijakan moneter

No	Aktivitas	Sampel Mean	STDEV (<i>Outer Loading</i>)
X _{1.1}	Saya memahami kebijakan moneter.	3.64	0.855068
X _{1.2}	Keputusan Pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	3.54	0.767151
X _{1.3}	Prinsip Pemberian Kredit oleh Pihak Bank kepada Pelaku UMKM (Kemampuan peminjam/pelaku UMKM)	3.80	0.639169
X _{1.4}	Dampak Kebijakan Kredit bagi Usaha Setelah Menerima Kredit	3.53	0.825167

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahawa semua indikator dinyatakan valid untuk menggambarkan variabel kebijakan moneter. Hal ini dibuktikan dengan nilai *outer loading* lebih besar dari 0,6. Implikasinya nilai indikator digunakan untuk mengukur variabel kebijakan moneter.

3.1.2. Variabel Kebijakan Fiskal (X2)

Variabel ini terdiri dari empat indikator dimana semua indikator dinyatakan valid untuk mengukur variabel kebijakan fiskal

Tabel 3. Deskriptive indikator variabel kebijakan Fiskal

No	Aktivitas	Sampel Mean	STDEV (<i>Outer Loading</i>)
X _{2.1}	Kebijakan Pajak 1% bagi UMKM	3,479789	0.663
X _{2.2}	Dampak UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM bagi pelaku UMKM	2,832526	0.824
X _{2.3}	Kebijakan fasilitas permodalan, pembiayaan dan informasi	2,54	0.840
X _{2.4}	Peningkatan Keberhasilan UMKM berdasarkan Dampak Kebijakan Pemerintah	2,690947	0.880

Variabel kebijakan fiskal memiliki empat indikator yang digunakan dalam penelitian dengan rata-rata sampel mean sebesar 2,88 yang menunjukkan rata-rata jawaban dari quisioner. Standar deviasi dapat dilihat dari nilai masing-masing *outer loading* dimana nilai lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti indikator yang digunakan sudah memenuhi syarat validitas variabel.

3.1.3. Variabel Kesuksesan UMKM (Y1)

Variabel kesuksesan UMKM Kota Surabaya memiliki lima indikator yang berguna untuk mengukur kesuksesan UMKM Kota Surabaya.

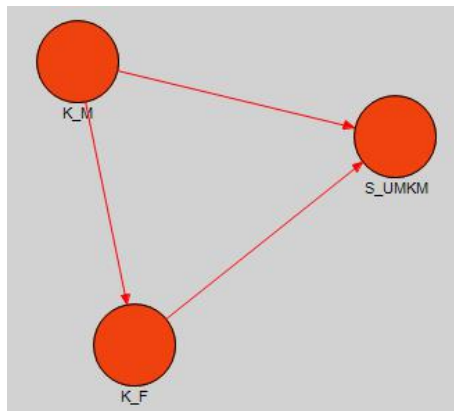
Tabel 4. Deskriptive indikator variabel kesuksesan UMKM Kota Surabaya (Y)

No	Aktivitas	Sampel Mean	STDEV (<i>Outer Loading</i>)
Y _{1.1}	Pertumbuhan (<i>growth</i>) UMKM	3,399	0.599
Y _{1.2}	Nilai Produk	3.681	0.744
Y _{1.3}	Akses pendanaan memiliki “hak” yang sama dengan usaha besar.	2.951	0,751
Y _{1.4}	Akses informasi, peluang usaha dan pasar.	3.450	0.644
Y _{1.5}	Keberhasilan usaha bagi aspek soisal Budaya dan Ekonomi	3.268	0,769

3.2. Perancangan Model Pengukuran

3.2.1. Merancang *Inner Model*

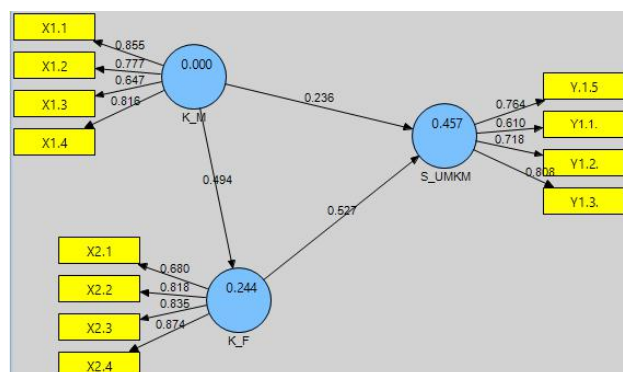
Perancangan *inner model* untuk menganalisis hubungan antara variabel eksogen dan endogen. *Inner model* dirancang berdasarkan hubungan antar variabel yang terdapat pada rumusan masalah dan hipotesa penelitian. *Inner model* dalam penelitian ini adalah:



Gambar 3. Inner Model
Sumber: Data Diolah

3.2.2. Merancang Outer Model

Perancangan *outer* model adalah untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator. Variabel merupakan indikator yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,5 dihilangkan, karena nilai indikator dibawah 0,5 untuk *outer loading* dianggap tidak valid.



Gambar 4. Outer Model
Sumber: Data Diolah

3.3. Hasil Evaluasi Uji Model

3.3.1. Outer Model

Tabel 5. Rule of Thumbs Validitas

Pengujian	Rule Of Thums	
Validitas Konvergen	<i>Outer Loading</i>	0,5 – 0,88
Validitas Diskriminan	<i>Cross Loading</i>	Lebih besar nilainya terhadap variabel laten lainnya.

Tabel 5. menjelaskan tentang nilai yang harus dipenuhi pada setiap indikator dan dimensi untuk mencapai validitas. Pengujian dilakukan pada setiap indikator dan dimensi model.

3.3.2. Validitas Konvergen

Evaluasi outer model pertama adalah validitas konvergen, yang digunakan untuk menguji validitas pertanyaan kuisisioner. Penelitian ini menguji kebijakan moneter yang terdiri

dari empat indikator, kebijakan fiskal yang terdiri dari empat indikator. Kesuksesan UMKM Kota Surabaya menggunakan lima indikator. Hasil pengolahan data pada gambar diatas menunjukkan bahwa *outer loading* dari 14 variabel memiliki nilai > 0.5 artinya memenuhi ketentuan dengan jumlah sampel 100. Dapat diartikan indikator membentuk setiap dimensi dalam model penelitian.

3.3.3. Validitas Diskriminan

Tabel 6. Nilai Cross Loading

	K_F	K_M	S_UMKM
X1.1	0.412350	0.855068	0.435234
X1.2	0.294366	0.767151	0.287685
X1.3	0.194289	0.639169	0.295257
X1.4	0.524255	0.825167	0.475717
X2.1	0.662918	0.495240	0.392581
X2.2	0.823973	0.405089	0.514608
X2.3	0.840426	0.290387	0.467943
X2.4	0.880027	0.388442	0.631026
Y1.5	0.432830	0.440149	0.769547
Y1.1.	0.412986	0.246960	0.599904
Y1.2.	0.324481	0.380496	0.744774
Y1.3.	0.635490	0.379959	0.751916

Sumber : Data Penelitian Diolah

Pengujian validitas diskriminan, nilai *cross loading* masing-masing variabel laten harus lebih besar dari nilai *cross loading* setiap variabel laten lainnya (Widarjono, 2015:277). Hasil pengolahan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cross loading* variabel laten lebih besar dari *cross loading* laten lainnya maka dapat dikatakan valid.

3.4. Reliabilitas Model

Tabel 7. Rule of Thumbs Uji Realiabilitas

Pengujian	Rule Of Thums	
Reliabilitas	Compossite Reability (CR)	>0.6
	Cronbach's Alpha (CA)	>0.6

Sumber: Widarjono, 2015: 277

Tabel diatas menjelaskan tentang nilai yang harus dipenuhi supaya suatu model dapat dikatakan reliabel.

Tabel 8. Nilai Uji reliabilitas

Indikator	Copossite Reability (CR)	Cronbach's Alpha (CA)
Kebijakan Moneter	0.858181	0.785143
Kebijakan Fiskal	0.879706	0.815481
Kesuksesan UMKM	0.817708	0.707552

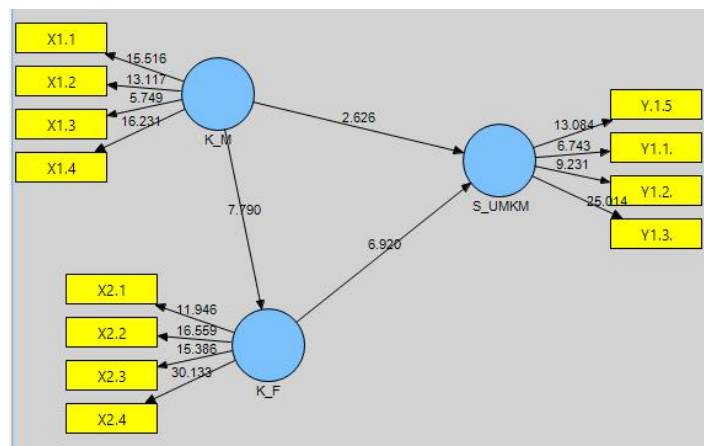
Sumber : Data Diolah

Tabel diatas menunjukkan hasil olahan data didapati bahwa nilai *Copossite Reability* (CR) dan *Cronbach's Alpha* (CA) memenuhi ketentuan tabel diatas artinya setiap variabel dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan.

3.5. Inner Model

3.5.1. Hasil *Bootstrapping*

Nilai koefisien jalur atau besarnya pengaruh variabel laten diukur dengan metode *bootstrapping*. Dalam penelitian ini didapatkan nilai 2.626 untuk besarnya pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya. Pengaruh kebijakan moneter terhadap kebijakan fiskal didapatkan nilai 7.790 dan untuk besarnya pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya setelah termediasi oleh kebijakan fiskal adalah 0.920.



Gambar.5. Hasil Hasil *Bootstrapping*
Sumber: Data Penelitian Diolah

3.5.2. Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Pada tahap ini dilakukan uji hipotesis *path coefficient*. Nilai yang disarankan adalah > 1.96 (hair, et al , 2011). Dengan melihat koefisien analisis jalur (*path coefficient*) maka dapat dilakukan evaluasi besarnya pengaruh masing-masing variabel laten independen (Widarjono, 2015:277).

Tabel 9. Koefisien Analisis Jalur

	T Statistik
Kebijakan Moneter → Kesuksesan UMKM Kota Surabaya	6.220037
Kebijakan Moneter -> Kebijakan Fiskal	7.789946
Kebijakan Fiskal _> Kesuksesan UMKM Kota Surabaya	6.919944

Sumber: Data Penelitian Diolah

Berdasarkan nilai koefisien analisis jalur didapatkan hasil bahwa variabel kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesuksesan UMKM karena nilai t > 1.96, maka kesimpulan hipotesis pada penelitian.

- H_1 = Pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya, 6.22 didapatkan hasil t-statistik dimana nilainya lebih besar dari 1.96 maka dapat dikatakan H_1 diterima karena variabel signifikan dan kebijakan moneter berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya.
- H_2 = Pengaruh kebijakan fiskal terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya didapatkan hasil penelitian 6.919 dimana nilainya lebih besar dari 1.96 maka dapat dikatakan H_2 , diterima karena variabel signifikan dan kebijakan fiskal berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya.
- H_3 = Kebijakan fiskal memediasi pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya didapatkan hasil 7.789 dimana nilainya lebih besar dari 1.96 maka dapat dikatakan H_3 diterima karena variabel signifikan dan kebijakan fiskal memediasi pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya.

3.5.3. Koefisien Determinasi

Nilai dari koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variansi variabel laten dependen dijelaskan variabel laten independen.

Tabel 10. Nilai Koefisien Determinasi

	R^2
Kesuksesan UMKM Kota Surabaya	0.202821
Kebijakan Fiskal	0.147744

3.5.4. Uji Efek Mediasi

Tabel 11. Hasil Uji Efek Mediasi

	<i>Direct Effect</i>	<i>Indirect Effect</i>
Kebijakan Moneter → Kesuksesan UMKM Kota Surabaya	0.236	0.1
Kebijakan Moneter -> Kebijakan Fiskal	0.494	
Kebijakan Fiskal > Kesuksesan UMKM Kota Surabaya	0.627	

Hasil menunjukkan bahwa efek mediasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter secara langsung lebih besar dibandingkan efek mediasi secara tidak langsung.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesuksesan UMKM Kota Surabaya sangat bergantung pada peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah mampu memberikan dampak positif jika sesuai mampu mengatasi permasalahan UMKM. Kebijakan moneter secara langsung berpengaruh terhadap terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya. Pemberian keringanan bunga kredit usaha dan bantuan pengembangan UMKM Kota Surabaya yang dilakukan Bank Indonesia selama ini sudah mampu meningkatkan kesuksesan UMKM. Pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya nilainya lebih kecil dibandingkan pengaruh kebijakan Fiskal secara langsung terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya. Peran kebijakan fiskal merupakan peran terbesar dari bentuk paket kebijakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan keringanan pajak dan pembebasan pajak bagi UMKM dapat secara signifikan mengurangi beban biaya operasional UMKM dan dapat mempercepat pertumbuhan UMKM.

Nilai pengaruh dari kebijakan moneter terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya melalui kebijakan fiskal sebagai variabel mediasi memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan kebijakan moneter secara langsung mempengaruhi kesuksesan UMKM Kota Surabaya. Masukan bagi pemerintah jika ingin meningkatkan kesuksesan UMKM Kota Surabaya sebaiknya memberikan kebijakan moneter melalui kebijakan fiskal sehingga memberikan pengaruh yang lebih besar untuk mensukseskan UMKM Kota Surabaya. Realisasi kebijakan fiskal dapat secara langsung diberikan kepada UMKM karena memiliki nilai mediasi cukup tinggi dimana akan berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya. Pemerintah sangat memiliki peranan penting untuk membantu kesuksesan UMKM Kota Surabaya.

Daftar Pustaka

- Akinboade, O. A., & Kinack, E. (2012). Regulation, awareness, compliance and SME performance in Cameroon's manufacturing and retail sectors. *International Journal of Social Economics*, 39(12), 933-950.
- Bungin, B. (2013). Metodologi penelitian sosial dan ekonomi. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Caldas Montes, G., & Cesar Albuquerque Bastos, J. (2013). Economic policies, macroeconomic environment and entrepreneurs' expectations: Evidence from Brazil. *Journal of economic studies*, 40(3), 334-354.
- Cebula, R. J., Rossi, F., & Clark, J. R. (2016). The Impact of Higher Quality Government Regulation of Business and Greater Economic Freedom on the Growth and Level of Living Standards: Evidence from OECD Nations.
- Fraser Ian, John Gionea and Simon Fraser, (2011). *Economic for Business*. Australia: Mc Graw-Hill.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM : INDEED A SILVER BULLET. *Journal of Marketing Theory and Practice vol. 19 no. 2*, 139-151.
- Krichevskiy, D., & Snyder, T. (2015). US State Government policies and entrepreneurship. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 4(1), 102-110.
- Mankiw, Euston and Peter Wilson, (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ojo, M. (2011). Co-operative and competitive enforced self regulation: the role of governments, private actors and banks in corporate responsibility. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 19(2), 139-155.
- Sambajee, P., & Dhomon, M. Z. A. (2015). Government and SMEs in the Maldives and Mauritius. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 21(6), 778-795.
- Schiler, (2009). *Essentials of Economic 7th*. New York: Mc Graw-Hill Irwin.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Welch Patrick J. and Gerry F. Welch, (2007). *Economics Theory & Practice 8th*. Edition USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Widarjono, A. (2015). *Analisis Multivariat Terapan Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wong, A., Wei, L., & Tjosvold, D. (2015). Business confidence in government regulators: cooperative goals and confirmation of face in China. *International Journal of Conflict Management*, 26(3), 268-287.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Data Jumlah UMKM Indonesia. (Diakses 10 february 2017) <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/>

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku . (Diakses 7 Februari 2017). Retrieved from <http://bps.go.id/>